

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Timur Tengah merupakan istilah awal yang disebutkan oleh orang Inggris untuk wilayah Asia Barat Daya dan Eropa Tenggara yang pada masa lalu masih berada dibawah kendali kerajaan Turki. Sebelum dikenal dengan istilah Timur Tengah, wilayah ini dikenal dengan sebutan Timur Dekat. Pada perang dunia ke-II Muncul istilah Timur Tengah karena wilayah Timur Tengah berbatasan dengan Eropa, Afrika dan Asia dan dianggap strategis oleh tentara Inggris. Istilah ini mulai digunakan untuk menyebut negara – negara yang berada di kawasan pasca Perang Dunia ke-2 (Printina, 2019).

Adanya keinginan diantara negara-negara Arab untuk mendirikan sebuah organisasi muncul pada saat perang dunia II berlangsung. Organisasi tersebut awalnya didirikan untuk mawadahi dan menjadi mediator diantara negara-negara Arab maupun perselisihan antara negara Arab dengan Negara Lain. Adanya keinginan untuk mendirikan organisasi awalnya didukung oleh Inggris, Hal ini dikarenakan Inggris memiliki tujuan untuk membangun citra baik dan bergabung dengan sekutu. Namun pada saat itu negara-negara Arab tidak memiliki ketertarikan untuk bergabung. Alasan negara-negara Arab enggan untuk bergabung dikarenakan pada saat itu juga turut berkembang semangat anti-kolonialisme di

sebagian besar negara-negara Arab. Pada saat itu dapat dikatakan Mesir masih menjadi negara boneka imperialis Proektorat Britania. Sedangkan Yordania, Bahrain, Irak, Qatar dan Uni Emirat Arab dijajah Inggris. Maroko, Tunisia, suriah dan Aljazair dijajah Perancis (Printina, 2019).

Council of Foreign Relation Liga Arab mencatat bahwa, adanya dukungan dari Inggris ini dinilai sebagai motivasi untuk segera membentuk sebuah kesatuan nasionalis Arab yang nantinya akan meningkatkan dukungan bagi orang-orang Arab Palestina. Puncaknya terjadi pada tanggal 7 Oktober 1944 dalam penandatanganan perjanjian Protokol Alexandria. Perjanjian Protokol Alexandria ditandatangani oleh 6 negara Arab dan pendirian organisasi Liga Arab satu tahun setelahnya (Masters & Sergie, 2020).

Upaya yang dilakukan oleh negara Timur Tengah terealisasi dengan terbentuknya organisasi regional bernama *The Arabian League* atau dikenal dengan Liga Arab. Liga Arab terbentuk atas inisiasi proposal atau ide yang diajukan oleh Raja Faruk dari Mesir, Liga Arab terbentuk pada tanggal 22 Maret 1945. Liga Arab berdiri atas dukungan dari 6 Negara awal, yaitu Mesir, Arab Saudi, Iraq, Yordania, Lebanon dan Suriah (Nuraeini S, 2010).

Sebagai sebuah organisasi regional, Liga Arab memiliki 22 Negara Anggota yaitu :

No	Negara	Status
1	Mesir	Pendiri
2	Arab Saudi	Pendiri
3	Iraq	Pendiri
4	Yordania	Pendiri
5	Lebanon	Pendiri

6	Suriah	Pendiri
7	Yaman	Pendiri
8	Libya	Anggota
9	Sudan	Anggota
10	Maroko	Anggota
11	Tunisia	Anggota
12	Kuwait	Anggota
13	Al Jazair	Anggota
14	Uni Emirat Arab	Anggota
15	Bahrain	Anggota
16	Qatar	Anggota
17	Oman	Anggota
18	Mauritana	Anggota
19	Somalia	Anggota
20	Palestina	Anggota
21	Djibouti	Anggota
22	Komoro	Anggota
23	Brazil	Pengamat
24	Venezuela	Pengamat
25	Eritrea	Pengamat
26	India	Pengamat

Tabel 1.1 Anggota Liga Arab

(Nuraeni S, 2010).

Kawasan Timur Tengah adalah wilayah yang sangat rawan terjadinya konflik. Konflik politik dan keamanan merupakan hal yang paling sering terjadi dikawasan ini. Konflik Internal negara, Konflik antar anggota Liga Arab maupun konflik dengan non - anggota Liga Arab sering terjadi dikawasan Timur Tengah. Minimnya resolusi terhadap konflik yang terjadi sangat berpengaruh terhadap citra kawasan Timur Tengah sebagai wilayah konflik dan berpengaruh pada stabilitas politik, keamanan internasional dan ekonomi kawasan Timur Tengah (Hatimah, 2015).

Liga Arab hadir sebagai organisasi yang dapat meredakan segala konflik yang terjadi pada anggotanya. Konflik antar negara seperti Palestina Israel, Sunni-

Syiah konflik internal seperti perang Libya, yaman Houthi. Bentuk Solidaritas antar anggota Liga Arab untuk mencapai tujuan didirikannya organisasi ini tertuang dalam piagam Liga Arab yang harus ditaati oleh Negara – Negara yang menjadi anggota Liga Arab (Sugito, 2012).

Liga Arab merupakan organisasi yang mendukung kemerdekaan Palestina. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh Liga Arab demi mendapatkan status kemerdekaan Palestina di mata Dunia. Agenda utama didirikannya Liga Arab adalah pembebasan terhadap anggota Liga Arab yang masih dijajah, menjaga hubungan baik antar anggota Liga Arab dan mencegah Yahudi untuk mendirikan negara diatas tanah Palestina. Hal tersebut tertulis dalam Perjanjian “*Charter Of The League Of Arab States*” atau dikenal dengan piagam Liga Arab pasal 2 yang berbunyi :

“Menjaga hubungan baik diantara negara – negara Arab dan mengkoordinasikan kegiatan politik negara anggota serta melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara dan menyelaraskan kepentingan – kepentingan Arab” (Sugito, 2012).

Upaya untuk mewisuda berbagai aspirasi dari warga Palestina yang diresmikan oleh Liga Arab, menghasilkan sebuah pengakuan PLO sebagai representasi rakyat Palestina oleh PBB. Berkat upaya dari Liga Arab dan pidato dari Yasser Arafat, PLO mendapatkan hak dan keistimewaan di dalam sidang atau rapat PBB.

Israel menahan setidaknya 6.500 warga Palestina dengan alasan berbagai kejahatan maupun terror. Terdapat setidaknya 500 tahanan yang ditahan tanpa

adanya pengadilan ataupun dakwaan. Hal ini dinilai merupakan suatu penahanan yang secara administratif karena melanggar Konvensi Jenewa ke-4.

Organisasi Liga Arab merespons dengan mengeluarkan pernyataan, melalui Sekjen Liga Arab, Ahmad Abhoul Gheit mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Israel telah menyiksa narapidana Palestina dan Abhoul Gheit mendesak *International Committee of the Red Cross* (ICRC) untuk mendesak penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan oleh Israel terhadap narapidana Palestina yang ditahan oleh Israel. Abul Gheit menyerukan ICRC untuk segera menuntut Israel agar memberikan perlakuan yang sesuai dengan standar hukum humaniter internasional (El-Shaded, 2017).

Organisasi Liga Arab yang meminta bantuan kepada ICRC untuk segera ikut campur merupakan respon dari Organisasi Liga Arab atas perlakuan yang dilakukan oleh Israel terhadap narapidana Palestina. Pelanggaran yang dilakukan Israel melanggar Konvensi Jenewa dan Liga Arab meminta organisasi dan lembaga lain mengambil langkah terkait kasus yang dihadapi. Bantuan yang diajukan bukanlah sebuah alasan, ICRC memiliki akses terhadap narapidana Palestina. Pada tanggal 27 Mei 2017, Israel menawarkan kesepakatan untuk berkompromi dengan narapidana Palestina yang mengajukan aksi mogok makan.

Kesepakatan yang diajukan oleh Israel dengan narapidana Palestina menjadi sebuah hasil positif atas perjuangan ICRC yang dijembatani oleh Liga Arab untuk mendesak Israel agar mengadakan komunikasi dengan para tahanan Palestina. Mogok makan ini telah berakhir setelah kesepakatan yang terjadi dan tahanan Palestina diperbolehkan untuk menerima kunjungan dari keluarganya dalam

rentang waktu dua kali dalam sebulan dan para tahanan Palestina diizinkan untuk berbicara dengan keluarga melalui telepon dibawah pengawasan petugas penjara (Beaumont, 2017).

Liga Arab didirikan dengan tujuan untuk melindungi kedaulatan masing-masing negara anggotanya serta peningkatan kerjasama (Pradana & Yulianti, 2017). Hal ini dikakarenakan kawasan Timur Tengah selalui mengalami konflik, peran Liga Arab dalam meminimalisasi konflik sangat diharapkan (Pradana & Yulianti, 2017).

Sebelum Uni Emirat Arab dan Israel menormalisasi hubungan, keduanya telah menjalin berbagai kerjasama yang bersifat rahasia. Pertemuan rahasia yang terjadi antara Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab dengan Perdana Menteri Israel terjadi di New York, Amerika Serikat pada bulan September 2012. Keduanya membicarakan tentang rencana penggagalan rencana nuklir yang sedang dilakukan oleh Iran (Ravid, 2017).

Kerjasama yang telah terjalin antara Uni Emirat Arab dengan Israel terealisasi pada bidang keamanan siber dan alat intelijen negara. Kerjasama ini mencapai biaya 3 Miliar USD dan telah disepakati pada bulan Agustus 2018 lalu. Kesepakatan ini berguna untuk meningkatkan militer antara kedua negara guna mencegah kejahatan terorisme dan kejahatan sipil yang menyebar luas melalui media internet (Barakat, 2020).

Selain itu, kerjasama militer antara Uni Emirat Arab dengan Israel juga terjalin setidaknya 3 kali sejak 2017 guna meningkatkan kekuatan Angkatan Udara. Kerjasama militer ini didukung penuh oleh Amerika Serikat dan Italia yang turut

serta dalam kegiatan ini (Cohen, 2017).

Kegiatan militer ini bertujuan untuk mengenalkan pesawat tempur F-35 yang dibeli Israel dari Amerika Serikat. Setelah kegiatan ini digelar, Uni Emirat Arab berkeinginan untuk memiliki pesawat F-35 dan mengirimkan delegasinya ke Israel untuk melihat kecanggihan dan teknologi dari pesawat F-35 lebih mendalam (i24News, 2018).

Adanya perjanjian *Abraham Accord* merupakan bagian dari kebijakan normalisasi. Uni Emirat Arab sepakat untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada (CNN Indonesia, 2020).

Perjanjian *Abraham Accord* yang telah disepakati antara Uni Emirat Arab dengan Israel memiliki beberapa poin penting. Poin penting yang telah disepakati yaitu :

1. Normalisasi Hubungan diantara UEA dengan Israel
2. Penyelesaian konflik UEA-Israel
3. Kesepakatan kerjasama dalam berbagai bidang (US Department of State : The Abraham Accords).

Berkaitan dengan kesepakatan antara UEA dengan Israel, terdapat beberapa respon dari Anggota Liga Arab. Beberapa negara menyambut baik perjanjian UEA-Israel seperti Bahrain, Mesir (Barakat, 2020), dan Yordania (Al Jazeera, 2020). Liga Arab turut mendukung adanya normalisasi guna menciptakan stabilitas khususnya kemerdekaan bagi palestina (Sicca, 2020). Respon sebaliknya justru keluar dari Palestina (International Quran News Agency, 2020).

Kebijakan normalisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai visi stabilitas

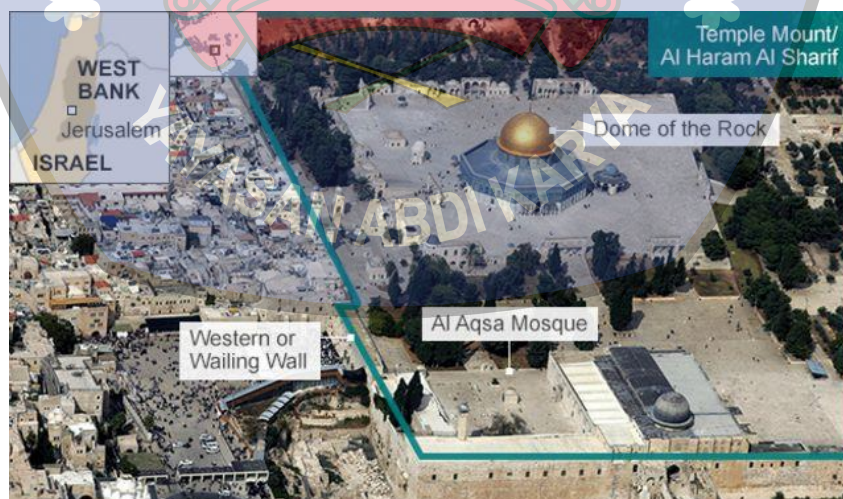
khususnya kemerdekaan bagi Palestina (US Department of State : The Abraham Accords).

Berdasarkan Konvensi Wina 1969 Pasal 2 perjanjian Internasional didefinisikan sebagai berikut :

“Perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya” (Mauna, 2003).

Namun, dalam implementasinya pelanggaran justru dilakukan oleh Israel dengan melakukan penyerangan terhadap *Kompleks Masjidil Aqsa* (Ibrahim, 2021).

Hal ini melanggar perjanjian *Abraham Accord*, Liga Arab beserta negara-negara yang tadinya mendukung normalisasi berbalik memberikan narasi negatif terhadap hal tersebut.



Gambar 1.1 Kompleks Masjidil Aqsa

Sumber
(Al-Khalidi, 2021)

Liga Arab (Zeid, 2021), Bahrain dan Yordania berbalik memberikan narasi negatif dan menyebut penyerangan kompleks masjidil Aqsa sebagai bentuk pelanggaran perjanjian internasional (Soraya, 2020).

Normalisasi seharusnya dapat meningkatkan stabilitas sesuai dengan tujuan awal *Abraham Accord*. Namun, Inkonsistensi Israel dalam bentuk penyerangan terhadap kompleks masjidil Aqsa menyebabkan berbagai kecaman dari Liga Arab dan negara-negara anggota yang sebelumnya mendukung adanya normalisasi.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin meneliti Penyerangan masjid Al-Aqsa sebagai bentuk Inkonsistensi Israel dalam kesepakatan *Abraham Accord* pasca normalisasi dengan UEA dan pengaruhnya terhadap stabilitas Politik Liga Arab.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mempunyai sebuah pertanyaan sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh *Inkonsistensi* Israel pada *Abraham Accord* terhadap stabilitas politik antar anggota Liga Arab ?”

1.3 Batasan Penelitian

Batas penelitian merupakan fokus yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Batasan digunakan agar fokus peneliti tetap dan tidak melebar. Batas penelitian ini hanya berfokus kepada Inkonsistensi Israel terhadap

Abraham Accord dan pengaruh terhadap stabilitas Liga Arab. Peristiwa penyerangan Israel pada Bulan Mei 2021 terhadap Kompleks Masjidil Aqsa dan respon terkait peristiwa terhadap penyerangan Israel pada Bulan Mei 2021 Kompleks masjid Al Aqsa menjadi batasan penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan awal dan alasan tentang topik dan judul yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Inkonsistensinya Israel dalam kesepakatan *Abraham Accord* dan pengaruhnya terhadap stabilitas Liga Arab. Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk menerapkan berbagai macam teori dan pandangan yang telah dipelajari dalam studi Hubungan Internasional guna menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Setelah mempelajari tentang berbagai macam teori yang ada dalam Hubungan Internasional, penulis mencoba untuk menggunakan ilmu yang telah dipelajari dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan akademik. Selama menempuh perguruan tinggi, Sudah banyak penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Melalui berbagai kajian yang telah dipelajari dari Studi Hubungan Internasional, Manfaat teoritis dari penelitian ini penulis berharap dapat

memberikan gambaran serta pengaruh inkonsistensi yang dilakukan oleh Israel terhadap stabilitas politik antar Anggota Liga Arab dari sudut pandang bidang keilmuan yang telah dipelajari dalam studi Hubungan Internasional.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang diterima secara langsung dari hasil penelitian bagi masyarakat atau pembaca agar membuka pandangan pembaca terhadap suatu penelitian berlandaskan teori atau landasan konseptual yang digunakan. Adapun manfaat praktis yang diterima terbagi menjadi 2, yaitu manfaat praktis bagi tercapainya stabilitas politik liga arab dan topik yang relevan untuk peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi beberapa bagian sistematika penulisan menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang tentang latar belakang dari permasalahan, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan secara rinci pada bab ini serta sistematika penulisan yang berguna untuk memperjelas setiap bab pada penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka berisi tentang pemikiran dan perspektif yang digunakan oleh penulis guna menjawab pertanyaan penelitian dan permasalahan yang ada. Pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian berisi tentang metode atau cara yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian. Pendekatan yang digunakan pada bab ini adalah penelitian yang digunakan deskriptif analisis, Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana hubungan UEA dengan Israel sebelum normalisasi dan proses pada saat kebijakan normalisasi disepakati. Ada

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan peristiwa secara rinci dari Hubungan UEA dengan Israel sebelum normalisasi, kepentingan dari UEA maupun Israel, Lahirnya Perjanjian *Abraham Accord* sebagai sebuah kesepakatan serta pengaruh inkonsistensi Israel dan analisa pengaruh inkonsistensi terhadap organisasi Liga Arab.

BAB V : Penutup

Bab Penutup merupakan bab akhir dari penelitian ini, penulis isi dengan kesimpulan yang telah dijelaskan dan saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian penulis